

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Hilda Sri Hastuti
NIM : 22 2013 294**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilda Sri Hastuti

NIM : 22 2013 294

Program Studi: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2017

Penulis,



Hilda Sri Hastuti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi
Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern
terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi
Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)
Nama : Hilda Sri Hastuti
Nim : 22 2013 294
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sekor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 20 Maret 2017

Pembimbing,



Drs. Sunardi, SE., M.Si
NIDN/NBM : 0206046303/784021

Mengetahui,

Dekan

u.p. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena anda tidak tahu seberapa dekat anda dengan kesuksesan”.

“Don’t lose the faith, keep praying and keep trying”.

“Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, sesungguhnya Allahlah yang akan melaksanakan urusan-Nya (QS.Ath Thalaq:3)”.

(Hilda Sri Hastuti)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku*
- ❖ Pembimbing Skripsiku*
- ❖ Kakak-Kakak Tercintaku*
- ❖ Sahabat Terbaikku*
- ❖ Almamater Kebanggaanku*

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat atas segala berkah dan rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)”**.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan public akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigm dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK), ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap LKPD artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda M.Teguh dan Ibunda penulis Eni Wati tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si yang telah

membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan seluruh jajaran Staf Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepala Dinas dan seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Ogan Ilir yang telah mengizinkan penulis dalam penelitian disana.
7. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2017

Penulis

Hilda Sri Hastuti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	9
2. <i>Good Governance</i>	10
3. Standar Akuntansi Pemerintah	12

4. Sistem Pengendalian Intern	17
5. Kualitas Laporan Keuangan	20
B. Penelitian Sebelumnya	22
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Hipotesis ..	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Operasionalisasi Variabel	32
D. Populasi.....	33
E. Data yang Diperlukan	33
F. Metode Pengumpulan Data.....	34
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	35
1. Analisis Data	35
2. Teknik Analisis.....	36
a. Uji Validitas.....	37
b. Uji Reliabilitas	38
c. Uji Asumsi Klasik	39
d. Uji Regresi Linier Berganda.....	43
e. Uji Koefisien Determinasi	43
f. Uji Hipotesis F	44
g. Uji Hipotesis t.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.....	47
a. Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.....	47
b. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.....	49
c. Visi Misi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.....	50
d. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir	51
2. Gambaran Karakteristik Responden.....	57
a. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
b. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	58
c. Gambaran Karakteristik Pendidikan.....	58
3. Gambaran Karakteristik Variabel.....	59
4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	62
B. Hasil Pengolahan Data	91
1. Uji Validitas	91
2. Uji Reliabilitas.....	95
3. Uji Asumsi Klasik	95
4. Analisis Regresi Berganda	101
5. Koefisien Determinasi.....	103
6. Uji Hipotesis F.....	104
7. Uji Hipotesis t.....	106
C. Pembahasan Hasil Penelitian	108

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	6
Tabel III.1	32
Tabel IV.1	57
Tabel IV.2	58
Tabel IV.3	58
Tabel IV.4	61
Tabel IV.5	62
Tabel IV.6	63
Tabel IV.7	64
Tabel IV.8	64
Tabel IV.9	65
Tabel IV.10	66
Tabel IV.11	67
Tabel IV.12	68
Tabel IV.13	69
Tabel IV.14	70
Tabel IV.15	71
Tabel IV.16	72
Tabel IV.17	73
Tabel IV.18	74
Tabel IV.19	75

Tabel IV.20	76
Tabel IV.21	77
Tabel IV.22	78
Tabel IV.23	79
Tabel IV.24	80
Tabel IV.25	81
Tabel IV.26	82
Tabel IV.27	83
Tabel IV.28	84
Tabel IV.29	85
Tabel IV.30	86
Tabel IV.31	87
Tabel IV.32	88
Tabel IV.33	89
Tabel IV.34	90
Tabel IV.35	91
Tabel IV.36	92
Tabel IV.37	93
Tabel IV.38	94
Tabel IV.39	94
Tabel IV.40	95
Tabel IV.41	97
Tabel IV.42	98

Tabel IV.43	100
Tabel IV.44	101
Tabel IV.45	103
Tabel IV.46	104
Tabel IV.47	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir	49
Gambar IV.2 Uji Normalitas.....	96
Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner	116
Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	120
Lampiran 3 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi	121
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Riset	122
Lampiran 5 Biodata Penulis.....	123

ABSTRAK

Hilda Sri Hastuti/222013294/2017/Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial. Data pada penelitian menggunakan data sekunder dan data primer dengan melihat hasil opini BPK, wawancara dan membagikan kuesioner. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan sampel jenuh atau sensus. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan *software* SPSS versi 21.0. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

Hilda Sri Hastuti/222013294/ 2017/ *The Influence of Good Governance, Government Accounting Standard and Internal Control System on the Quality of Financial Statement at BPKAD of Ogan Ilir.*

Objective of the study was partially investigating the influence of good governance, government accounting standard and internal control system on the quality of financial statement at BPKAD of Ogan Ilir. Data of the study used secondary data and primary data by looking at BPK opinion, interviews and distributing questionnaires. Sampling was conducted with saturated sampling or census. Data analysis technique was simple linear regression with SPSS version 21. The results of the study showed that good governance did not influence on the quality of financial statement and government accounting standard influenced significantly on the quality of financial statement, and then internal control system influenced significantly on the quality of financial statement.

Keywords: *Good Governance, Government Accounting Standard, Internal Control System, The Quality of Financial Statement.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban, sehingga harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Indonesia yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan (Mahmudi, 2016: 19).

Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan LKPD, artinya dapat

dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yakni : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP) dan Pernyataan Menolak memberi opini. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi.

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009: 18).

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Tujuan sistem pengendalian intern adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008: 163).

Penelitian-penelitian mengenai kualitas laporan keuangan yang dilakukan di Indonesia antara lain dilakukan oleh Permana dalam Azlim dkk (2012) dengan judul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya pada akuntabilitas (survei pada dinas Kota Bandung). Kesimpulan dari penelitian

tersebut adalah standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di dinas Kota Bandung. Standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh sebesar 31,1% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas Pemerintah Kota Bandung.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Susilawati dan Dwi (2014) dengan judul standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern sebagai anteseden kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 52%, sedangkan secara parsial standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 13% namun tidak signifikan dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 74.6%.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Tuti (2014) yang berjudul pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (survei pada organisasi perangkat daerah Pemda Cianjur), kesimpulan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Manuppan (2015) yang berjudul pengaruh *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan

(studi empiris pada SKPD Kota Dumai), menyimpulkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini mengindikasikan bahwa semakin berjalan penerapan *good governance* maka kualitas laporan keuangan tersebut akan semakin baik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ali dan Sri (2016) dengan judul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai *variabel moderating*, dengan hasil bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan sistem pengendalian intern tidak memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang beralamat di jalan Indralaya raya tanjung senai. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir berawal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir nomor 23 tahun 2015 tentang organisasi perangkat daerah. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir memiliki beberapa bidang antara lain : kepala badan, sekretaris, kepala bidang anggaran dan perbendaharaan, kepala bidang akuntansi dan kepala bidang aset daerah. Hasil opini BPK Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat dari tabel I.1 sebagai berikut :

Tabel I.1
Hasil Opini BPK atas LKPD Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2011-2015

Hasil Opini BPK				
Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
WDP	WDP	WDP	WTP	WDP

Sumber : Palembang.bpk.go.id

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh BPK RI atas pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir periode tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan di tahun 2014 Kabupaten Ogan Ilir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, pada tahun 2011 dan 2012 Kabupaten Ogan Ilir mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dikarenakan dinilai belum mengelola, menyajikan dan mengungkapkan aset tetap secara memadai, diantaranya masih terdapat selisih antara nilai aset tetap yang di sajikan di neraca dengan hasil inventarisasi SKPD sebesar Rp. 1.170.357.745.188,77, serta terjadi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan anggaran belanja modal, dengan melihat selisih sebesar itu, berarti laporan keuangan yang disajikan belum memenuhi kriteria sistem pengendalian intern pemerintah yang baik salah satu nya keandalan laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum optimal. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Ogan Ilir dimana pada tahun 2013 Kabupaten Ogan Ilir mendapat opini WDP dikarenakan masih terdapat selisih antara nilai aset tetap yang

disajikan di neraca dengan hasil inventarisasi SKPD sedangkan pada tahun 2015 Kabupaten Ogan Ilir memperoleh opini WDP dikarenakan dalam pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami standar akuntansi pemerintah yang sekarang berlaku yaitu basis kas ke basis akrual sehingga menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang belum baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membahas masalah ini lebih dalam lagi dan menuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis mencoba merumuskan masalah adalah bagaimanakah pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir) ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama dalam kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Dengan melihat hasil pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dijadikan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan operasional pemerintah.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party* (Budi, 2015: 5-6).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan, dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan

kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai *principal*, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya.

2. *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009: 18).

b. Karakteristik *Good Governance*

Karakteristik pelaksanaan *good governance* (Mardiasmo, 2009: 18) meliputi :

1) *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi

tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3) *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4) *Responsiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5) *Consesensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7) *Efficiency and Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8) *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9) *Strategic vision*

Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

3. **Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No.71 tahun 2010).

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor, judul, isi dan tanggal berlaku (Baldric, 2015: 72).

Standar akuntansi pemerintah diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas (Deddi, 2008: 25).

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Indra, 2010: 137).

Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 hal (Nunuy, 2009: 27-28) yaitu :

a. Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Dalam menentukan apakah suatu kejadian atau peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar

dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

c. Pengungkapan

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan yang disajikan (PP No.71 tahun 2010).

Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah (PP No.71 tahun 2010) yaitu :

1) Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

2) Nilai Historis (*Historical Cost*)

Pencatatan didasarkan pada nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai

wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi, dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3) Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas catatan atas laporan keuangan.

5) Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas laporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumberdaya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

6) Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7) Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP no.60 tahun 2008).

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2008 pasal 2).

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atau risiko yang di hadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan

Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawab nya.

Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eskternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggungjawab operasional.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin,

supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

5. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan organisasi sektor publik meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan (Indra, 2010: 131).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai Kerangka Konseptual PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Erlina dkk, 2015: 19).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang di kehendaki (PP No.71 Tahun 2010) yaitu :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini

dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki karakteristik :

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- 2) Memberikan manfaat prediktif (*predictive value*)
- 3) Tepat waktu
- 4) Lengkap

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- 1) Penyajian jujur
- 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*)
- 3) Netralitas

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan dengan bila suatu entitas menerapkan

kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu dan Wayan (2014) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar ?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah,

sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah variabel kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Manuppan (2015) yang berjudul pengaruh *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi keuangan (studi empiris pada SKPD Kota Dumai). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan (studi empiris pada SKPD Kota Dumai). Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Dumai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan bahwa variabel *good governance*, kompetensi sumber daya dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang akan dihasilkan akan semakin baik.

Penelitian sebelumnya di lakukan oleh Yusniyar dkk (2016) yang berjudul pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern terhadap *good governance* dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan (studi pada SKPA Pemerintah Aceh). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh sistem akuntansi pemerintah dan pengendalian intern terhadap *good governance*? dan apakah pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPA di Pemerintah Aceh?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi pemerintah dan pengendalian intern terhadap *good governance* serta untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPA di Pemerintah Aceh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap *good governance*. Semua variabel yang diteliti ikut berpengaruh terhadap *good governance*, besarnya *good governance* pada SKPA di Pemerintah Aceh dipengaruhi oleh sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern. (2) Sistem akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap *good governance*, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi pemerintahan maka semakin baik juga tingkat prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan oleh aparatur pada setiap SKPA di Pemerintah Aceh. (3) Pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif terhadap *good governance*. (4) Sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern dan *good governance* secara simultan

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (5) Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan lemah terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah kurang mampu memberikan kontribusi laporan keuangan, sehingga belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. (6) Pengendalian intern berpengaruh positif dan lemah terhadap kualitas laporan keuangan. (7) *Good governance* berpengaruh positif dan sedang terhadap kualitas laporan keuangan.

Persamaan antara ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada variabel kualitas laporan keuangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan membagikan kuesioner kepada responden penelitian. Perbedaan antara penelitian penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada tempat penelitiannya dan pada penelitian Manuppan (2015) menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia.

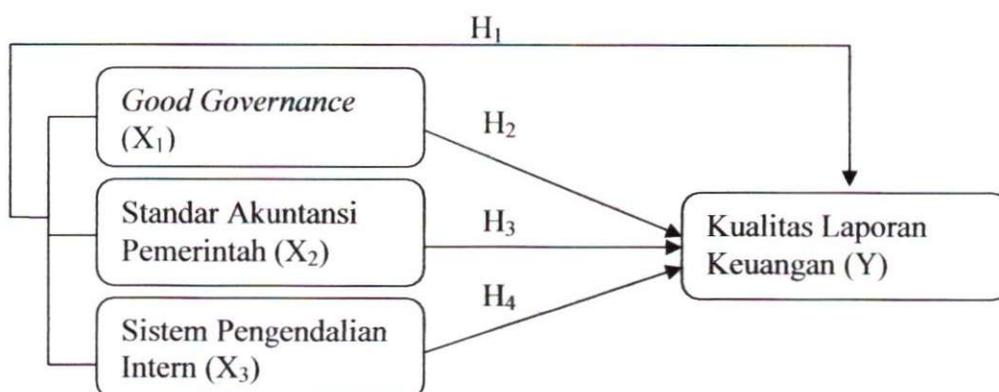
C. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan *good governance* agar berjalan dengan baik harus memenuhi sembilan karakteristik yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision*, dengan menerapkan tata kelola pemerintah yang baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Standar akuntansi pemerintahan diterapkan dilingkup

pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah, ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas, untuk memenuhi sebuah laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan komponen lain salah satunya yaitu sistem pengendalian intern yang terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi empat kriteria kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian dari landasan teori, maka disusun suatu model penelitian mengenai penelitian yang akan dilakukan. Model penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis, 2017

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen yaitu *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern.

1. Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan *good governance* telah dilakukan dengan baik meliputi transparansi informasi keuangan dan non keuangan, partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan prinsip akuntabilitas instansi kepada publik serta penyusunan laporan keuangan daerah yang baik harus menerapkan standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan (Azlim, 2012). Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya untuk itu pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Susilawati dan Dwi, 2014).

2. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pelaksanaan *good governance* dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi sehingga sumber daya daerah yang berada

dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga tercapailah karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Azlim dkk, 2012).

Variabel *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *good governance* yang baik akan menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang baik pula (Azlim dkk, 2012).

3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi pemerintah terdapat hubungan terkait dengan kualitas laporan keuangan. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya kualitas laporan keuangan di Indonesia (PP No.71 tahun 2010).

Pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu : “SAP di terapkan dilingkup

pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemen maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah” (Deddi, 2008: 25).

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tujuan sistem pengendalian internal salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Salah satu bagian didalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian (*internal control*) (Warren dalam Susilawati dan Dwi, 2014).

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidak nya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah (Tuti, 2014).

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian landasan teori , konsep dan kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ = *Good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan.

H₂ = *Good governance* signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan.

H₃ = Standar akuntansi pemerintah signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan.

H₄ = Sistem pengendalian intern signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat penjelasan), penelitian dibedakan atas tiga jenis (Misbahuddin dan Iqbal, 2013: 8) sebagai berikut:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel lainnya dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Hubungan

Penelitian hubungan adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hubungan untuk meneliti adanya hubungan sebab akibat antar variabel *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang beralamat Jalan Indralaya Raya Tanjung Senai.

C. Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan metode penelitian diatas, penulis membuat tabel operasionalisasi variabel sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
<i>Good Governance</i> X ₁	<i>Good governance</i> sebagai suatu penyelenggaraan yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Participation</i> b. <i>Rule of law</i> c. <i>Transparency</i> d. <i>Responsiveness</i> e. <i>Consensus Orientation</i> f. <i>Equity</i> g. <i>Efficiency and Effectiveness</i> h. <i>Accountability</i> i. <i>Strategic vision</i> 	Skala Ordinal
Standar Akuntansi Pemerintah X ₂	Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Basis Akuntansi b. Nilai Historis c. Realisasi d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal e. Periodisitas f. Konsistensi g. Pengungkapan Lengkap h. Penyajian wajar 	Skala Ordinal
Sistem Pengendalian Intern X ₃	Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian resiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan Komunikasi e. Pemantauan 	Skala Ordinal
Kualitas Laporan Keuangan Y	Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Relevan b. Andal c. Dapat di bandingkan d. Dapat di pahami 	Skala Ordinal

Sumber : Penulis, 2017

D. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013: 118), jadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 35 pegawai/responden. Sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh artinya semua populasi dijadikan sampel.

E. Data yang Diperlukan

Sumber data penelitian terdiri atas (Nur dan Bambang, 2016: 146) :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara, kuesioner, gambaran umum dan struktur organisasi, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa opini BPK yang diperoleh dari situs resmi BPK Palembang.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara (Sugiyono, 2013: 194-203) sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan kuesioner. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang tidak terstruktur kepada Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, kuesioner dengan mengajukan pernyataan secara tertulis dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1) Analisis Data

Semua data yang pada gilirannya merupakan variabel yang kita ukur, dapat diklasifikasikan menjadi dua (Kuncoro, 2013: 145) yaitu:

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat, dengan kata lain, data kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan data kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi dan dibantu oleh *Statistical Product And Service Solutions* (SPSS) yang berupa penilaian dari hasil pengisian kuesioner.

Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian (Sugiyono, 2013: 132) antara lain adalah :

a) Skala *Likert*

b) Skala Gutman

c) *Semantic Deferential*

d) *Rating Scale*

Pada penelitian ini skala yang akan digunakan adalah skala *likert*. Pada skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban pada skala *likert* dapat berupa kata-kata antara lain :

Sangat Setuju	= SS	= 5
Setuju	= S	= 4
Netral	= N	= 3
Tidak Setuju	= TS	= 2
Sangat Tidak Setuju	= STS	= 1

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang berbantuan ordinal dinaikan skalanya menjadi interval. Proses menaikkan skala dari ordinal menjadi interval menggunakan *software* (program) MSI (*Methods Successif Interval*).

2) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan adalah analisis regresi liner berganda untuk meyakinkan bahwa variabel bebas

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji f) dan (uji t) untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Product And Service Solutions* (SPSS). Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode OLS (*Ordinary Least Square*) maka lebih terlebih dahulu harus melakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik.

a. Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010: 172). Dengan menggunakan instrumen yang valid diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid, jadi instrumen yang valid merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid.

Uji validitas kuesioner biasanya dimaksud adalah validitas item, yang dimaksudkan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner apakah sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item yang valid ditunjukkan dengan adanya korelasi yang signifikan antara item terhadap skor total item. Untuk

penentuan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item (Duwi, 2016: 51). Metode pengujian validitas item pada SPSS yang bisa digunakan yaitu dengan metode korelasi *Pearson* atau metode *Corrected item- Total Correlation*.

Nilai korelasi r hitung dibandingkan dengan r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data (n) = 15 atau df ($n-2$) atau ($15-2$) maka didapat r tabel sebesar 0,514 (Duwi, 2016: 56). Jadi apabila r hitung lebih besar dari r tabel dinyatakan valid dan sebaliknya apabila nilai r hitung lebih kecil dari r tabel dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Setelah dapat ditemukan bahwa pernyataan dan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid dengan r hitung lebih besar dari r tabel, maka selanjutnya pernyataan dan pertanyaan yang dinyatakan valid tersebut, diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah *Cronbach's Alpha*. Metode ini sangat cocok

digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan (misal 0-10, 0-30). Untuk penentuan apakah instrument reliabel atau tidak, bisa digunakan batasan tertentu seperti 0,6 (Duwi, 2016: 60).

Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan *software* SPSS. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternative jawaban lebih dari dua. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan *Cronbach's Alpha* $> 0,70$ (Imam, 2013: 48).

c. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier sederhana perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk

menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (*normal P-P plot*) dan analisis statistik (*One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*). Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas dengan analisis grafik *normal P-P plot* (Duwi, 2013: 59) yaitu :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas dengan analisis grafik *Kolmogrov-Smirnov Test* (Duwi, 2013: 15) yaitu:

- a) Jika signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b) Jika signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan korelasi antara variabel bebas tersebut. Apabila interpretasi ini dilanggar dengan terjadinya hubungan antar

variabel bebas, maka timbulah gejala yang disebut multikolonieritas. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat *tolerance* dan VIF (*variance inflation factor*). Semakin kecil nilai *tolerance* dan semakin besar VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa jika *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Duwi, 2013: 60).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut heteroskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas, ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat *scatter plot* (nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID) uji glejser, uji *park*, uji koefisien korelasi spearman. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji *scatter plot*. Dasar analisis untuk pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *scartter plot* (Imam, 2013: 139) yaitu :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi secara residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test). Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian autokorelasi dengan melihat *durbin watson* (Imam, 2013: 111) yaitu:

- a) Jika $0 < d < dl$ berarti tidak ada autokorelasi positif.
- b) Jika $dl \leq d \leq du$ berarti tidak ada autokorelasi positif.
- c) Jika $4-dl < d < 4$ berarti tidak ada autokorelasi negatif.
- d) Jika $4-du \leq d \leq 4-dl$ berarti tidak autokorelasi negatif.
- e) Jika $du < d < 4-du$ berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

d. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dan variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linier berganda (Duwi, 2013: 41) sebagai berikut:

$$Y' = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

X_1 = *Good governance*

X_2 = Standar akuntansi pemerintah

X_3 = Sistem pengendalian intern

Y' = Kualitas laporan keuangan

B_0 = Konstanta

b = Koefisien regresi variabel X

e. Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah

Adjusted R Square. Hasil perhitungan *R Square* dapat dilihat pada *output model summary*. Pada kolom *R Square* dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

f. Uji Hipotesis

1. Uji Hipotesis secara bersama-sama (Uji F)

Pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan X_1 , X_2 , secara bersama-sama mempengaruhi Y .

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : *Good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan secara bersama.

H_a : *Good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern memengaruhi kualitas laporan keuangan secara bersama.

b) Menentukan Tarif Nyata

Tingkat signifikan 5% taraf nyata dari tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, taraf nyata (α) berarti nilai t tabel,

taraf nyata dari f tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n - k - 1$.

c) H_0 ditolak apabila F hitung $>$ F tabel, H_a diterima apabila F hitung $<$ F tabel.

d) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila F hitung $>$ F tabel atau H_a diterima F hitung $<$ F tabel.

2. Uji Hipotesis secara Parsial/individu (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial/individu merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi sederhana dengan hanya satu B (B_1 atau B_2) yang mempengaruhi Y . Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individu yaitu :

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H_{01} : *Good governance* tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan secara individu.

H_{a1} : *Good Governance* memengaruhi kualitas laporan keuangan secara individu.

H_{02} : Standar Akuntansi Pemerintah tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan secara individu.

H_{a2} : Standar Akuntansi Pemerintah memengaruhi kualitas laporan keuangan secara individu.

H_{03} : Sistem Pengendalian Intern tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan secara individu.

H_{a3} : Sistem Pengendalian Intern memengaruhi kualitas laporan keuangan secara individu.

b) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, taraf nyata (α) berarti nilai t tabel, taraf nyata dari f tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

c) H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel, H_a diterima apabila t dihitung $<$ t tabel. Berdasarkan probabilitas H_0 ditolak jika P value $<$ 5% , H_0 diterima jika P value $>$ 5%.

d) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel atau H_a diterima apabila t hitung $<$ t tabel.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

a. Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

Kabupaten Ogan Ilir berdiri sejak tanggal 07 Januari 2004 sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Masa 5 tahun pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010-2015 sesuai dengan amanah RPJM Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 telah melaksanakan tugas umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, 227 desa dan 14 kelurahan. Jumlah desa terbanyak Kecamatan Pemulutan dengan 25 desa, Kecamatan Tanjung Batu dengan 19 desa, Kecamatan Indralaya 17 desa dan 3 kelurahan, Kecamatan Tanjung Raja dengan 15 desa dan 4 kelurahan serta Kecamatan Indralaya Utara dengan 15 desa dan 1 kelurahan.

Kabupaten Ogan Ilir memiliki tujuh badan pemerintahan salah satunya Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengelola

keuangan aset daerah. Badan pengelola keuangan aset daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam bidang pengelolaan keuangan aset daerah.

b. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

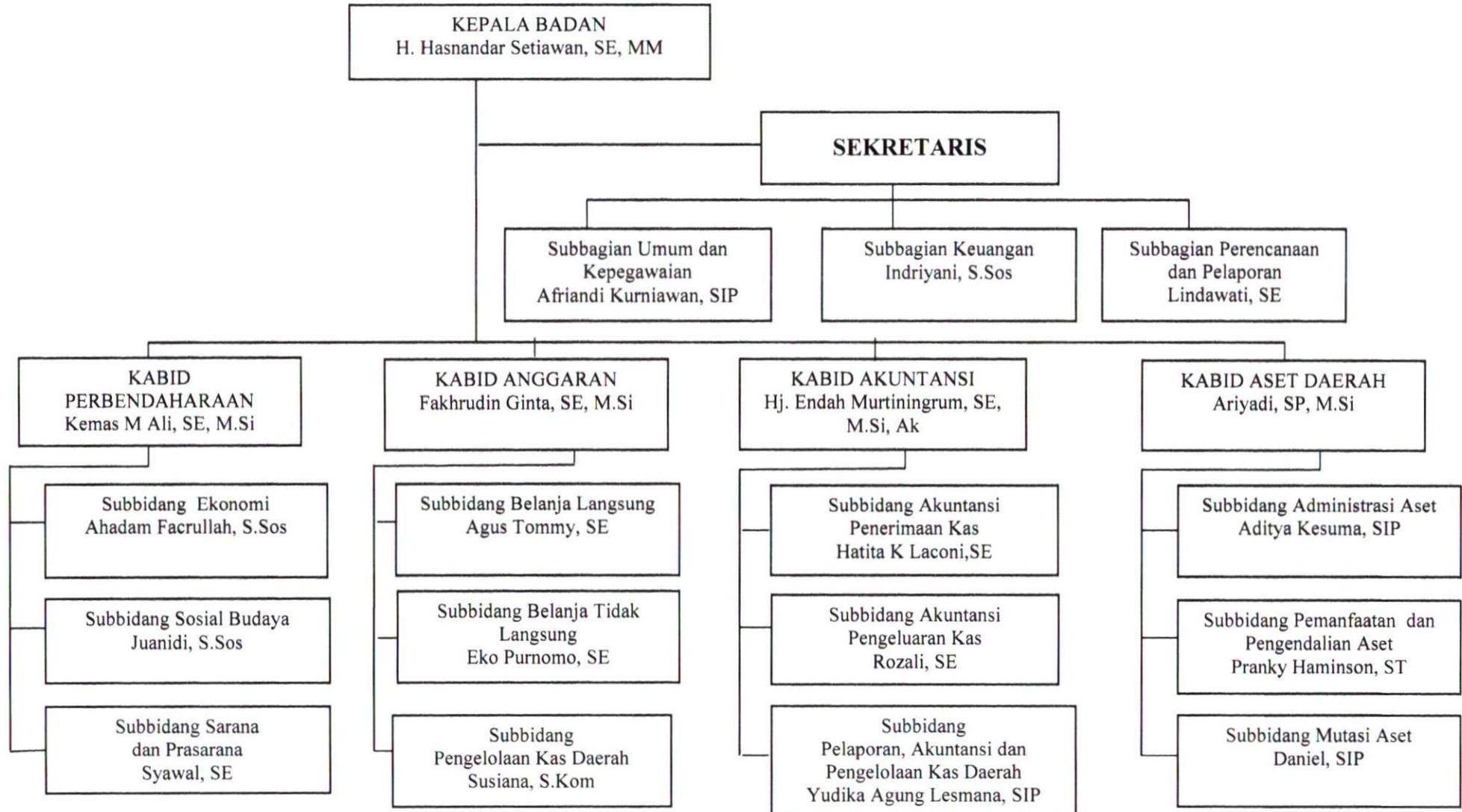
Menjamin kelancaran tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, maka diperlukan suatu koordinasi kegiatan tugas diantara masing-masing pegawai yang mencerminkan aktivitas tertentu yang mencakup hubungan diantara masing-masing bagian. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian atau departemen, maka semakin kompleks pula hubungan yang ada diantara pegawai sehingga masing-masing pegawai mengetahui tanggung jawabnya. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memberikan gambaran hubungan antara satu bagian dengan bagian lain dalam suatu unit organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dimulai dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat terendah dalam unit organisasi tersebut.

Struktur organisasi pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar VI.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR



c. Visi Misi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 yang telah ditetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Ogan Ilir adalah Terwujudnya masyarakat Ogan Ilir lebih sejahtera, unggul dan berkualitas dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka Visi Misi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir yaitu sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam pelaksana pemerintahan yang bersih yang dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- 2) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam pelaksana penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dalam hal memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan dan mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam pelaksana penyelenggaraan sistem tata kelola administrasi dengan mengedepankan ketersediaan data dan dokumentasi sesuai tahapan proses pelaksanaan kegiatan.

d. Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

1) Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pengelolaan keuangan aset daerah. Fungsi kepala badan adalah :

- a) Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah Kabupaten.
- b) Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
- c) Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah Kabupaten.
- d) Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah Kabupaten.
- e) Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
- f) Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten.
- g) Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
- h) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten.
- i) Pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU Kabupaten.

- j) Pengelolaan, perencanaan dan pelaporan DAK.
- k) Pengelolaan, Pengendalian dan pelaporan DBH Kabupaten.
- l) Menyampaikan laporan keuangan dan neraca per 31 Desember kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan RKA dan RKA perubahan SKPD
- b) Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran.
- c) Pelaksanaan monitoring anggaran SKPD.
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPD.
- e) Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah SKPD.
- f) Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah SKPD.
- g) Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD.

- h) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- i) Pengelolaan urusan rumah tangga
- j) Pengelolaan kearsipan.
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3) Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan penyusunan program anggaran perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pembinaan administrasi keuangan perangkat daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan menyiapkan bahan teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
- b) Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah.
- c) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- d) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA, RKAP, DPA dan DPAP.
- e) Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

- f) Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan APBD dan rancangan perubahan APBD.
 - g) Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
 - h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD dan SKPKD.
 - i) Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD dan SKPKD.
 - j) Pelaksanaan penerbitan SPD sebagai pengendalian pelaksanaan APBD.
 - k) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dalam rangka penyusunan program.
 - l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran SKPD.
 - m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 4) Kepala Bidang Akuntansi

Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, retuisi dan pelaporan keuangan daerah. Untuk

melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi daerah dan akuntansi SKPD.
- b) Melaksanakan pengujian rekening belanja atas SP2D.
- c) Melaksanakan restitusi/pengembalian pendapatan daerah.
- d) Melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e) Menyusun laporan keuangan daerah triwulan, semester dan tahunan.
- f) Melaksanakan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- g) Menyajikan informasi keuangan daerah.
- h) Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi transaksi penerimaan.
- i) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan SKPD terkait.
- j) Melaksanakan koreksi jurnal penerimaan.
- k) Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi pengeluaran.
- l) Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran dengan SKPD terkait.
- m) Melaksanakan koreksi jurnal pengeluaran.
- n) Menyusun laporan realisasi APBD semester dan prognosis 6 bulan berikutnya.
- o) Menyiapkan rancangan perda pertanggungjawaban APBD.
- p) Kepala Bidang Akuntansi

5) Kepala Bidang Aset Daerah

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan peraturan tata laksana barang milik daerah (BMD).
- b) Melaksanakan pendataan, penatausahaan barang milik daerah.
- c) Menyusun tata cara penuntutan ganti rugi barang milik daerah.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan BMD.
- e) Melaksanakan pengamanan, pengendalian sertifikasi, BPDB dan STNK BMD.
- f) Menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemda.
- g) Menyusun harga satuan umum.
- h) Melakukan penilaian dan penghapusan BMD.
- i) Menghimpun laporan mutasi barang milik daerah dan pengguna barang.
- j) Menyusun laporan pembukuan, penambahan, pengurangan dan pemindahtanganan BMD.
- k) Melakukan pembinaan pelaporan BMD.
- l) Menyusun buku induk inventarisasi barang tahunan dan pengguna barang.

2. Gambaran Karakteristik Responden

Penelitian ini berdasarkan pada transformasi terhadap data penelitian dalam tabulasi, sehingga mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami. Kuesioner ini telah disebarakan kepada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang berstatus PNS dengan jumlah 35 Responden. Kuesioner yang kembali sebanyak 30 kuesioner dan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 kuesioner dikarenakan 4 kuesioner hilang pada saat pengisian kuesioner dan 1 kuesioner yang cacat, jadi kuesioner yang dapat diolah sebanyak 30 kuesioner.

a. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	%
1	Laki-Laki	17	57%
2	Perempuan	13	43%
	Total	30	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat disimpulkan bahwa dari 30 responden dalam penelitian ini, terdapat laki-laki berjumlah 17 dan responden perempuan berjumlah 13, yang artinya responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki, dimana menurut proses psikologi secara umum laki-laki lebih cenderung kurang responsif dalam menjawab isi dari kuesioner tersebut sedangkan perempuan

lebih rapi dan tepat sasaran dalam menjawab isi kuesioner yang dibagikan

b. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel IV.2 sebagai berikut :

Tabel IV.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	%
1	20-30	16	53%
2	31-40	10	33%
3	41-50	4	13%
	Total	30	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.2 dapat disimpulkan bahwa dari 30 responden dalam penelitian ini, terdapat 20-30 umur responden sebanyak 16, 31-40 umur responden sebanyak 10 dan 41-50 umur responden sebanyak 4, menurut BPS usia 15-49 tahun dikatakan usia sangat produktif yang artinya 20-49 tahun tepat dalam menjawab isi kuesioner yang dibagikan.

c. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel IV.3 sebagai berikut :

Tabel IV.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	S2	2	7%
2	S1	21	70%
3	D3	7	23%
	Total	30	100%

Sumber : Data Primer Diolah , 2017

Berdasarkan Tabel IV.3 dapat disimpulkan bahwa dari 30 responden dalam penelitian ini, terdapat 2 responden untuk pendidikan S2, 21 responden untuk pendidikan S1 dan 7 responden untuk pendidikan D3, yang artinya penelitian ini didominasi oleh pendidikan S1 dimana pendidikan S1 lebih mengerti dan memahami dalam menjawab isi kuesioner yang dibagikan.

3. Gambaran Karakteristik Variabel

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari 4 variabel, 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas adalah *good governance* (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2), sistem pengendalian intern (X_3) dan variabel terikat adalah kualitas laporan keuangan (Y). Butir pernyataan pada variabel bebas pertama (X_1) berjumlah 12 pernyataan yang terdiri dari 9 indikator yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision*.

Butir pernyataan pada variabel kedua (X_2) berjumlah 8 pernyataan yang terdiri dari 8 indikator yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, penyajian wajar.

Butir pernyataan pada variabel ketiga (X_3) berjumlah 6 pernyataan yang terdiri dari 5 indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemanfaatan.

Butir pernyataan pada variabel terikat (Y) berjumlah 4 pernyataan yang terdiri dari 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Tujuan diberikan pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Data ordinal yang sudah diberikan skor kemudian disusun kedalam tabulasi yang membantu peneliti dalam melakukan berbagai analisis pada penelitian ini, kemudian skor atas jawaban responden dijumlahkan berdasarkan variabel masing-masing responden. Rekapitulasi data ordinal mengenai jawaban responden tentang *good governance* (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2), sistem pengendalian intern (X_3) dan kualitas laporan keuangan (Y) dapat dilihat pada Tabel IV.4 sebagai berikut :

Tabel IV.4
Rekapitulasi Jawaban Responden (Data Ordinal)

Responden	Total X ₁	Total X ₂	Total X ₃	Total Y
1	47	27	23	16
2	48	32	24	16
3	49	35	26	20
4	54	32	27	15
5	54	37	29	17
6	44	32	24	16
7	47	32	24	16
8	46	32	24	16
9	53	32	23	14
10	44	28	22	13
11	50	29	26	20
12	52	33	25	19
13	41	30	29	18
14	42	27	26	20
15	44	32	23	15
16	46	34	25	18
17	46	34	25	18
18	55	35	26	19
19	49	32	27	19
20	56	30	26	17
21	47	38	27	19
22	60	40	30	20
23	53	37	24	18
24	53	37	24	20
25	59	36	28	20
26	57	37	29	17
27	50	35	25	20
28	60	32	30	20
29	60	32	30	20
30	60	32	30	20

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Karena syarat untuk melakukan analisis regresi, data harus interval maka data ordinal tersebut diubah menjadi data interval dengan menggunakan program (*software*) MSI (*Method Successif Interval*). Hasil

perubahan data ordinal menjadi data interval, dapat dilihat pada Tabel IV.5 sebagai berikut :

Tabel IV.5
Hasil Total Jawaban Responden (Data Interval)

Responden	Total X ₁	Total X ₂	Total X ₃	Total Y
1	27.386	17.205	14.081	9.897
2	28.835	22.588	15.493	9.897
3	31.150	26.750	18.466	15.361
4	39.719	25.510	19.761	8.809
5	37.979	30.188	22.864	12.108
6	25.622	22.588	15.493	9.897
7	27.939	22.588	15.493	9.897
8	27.302	22.588	15.493	9.897
9	37.556	22.588	11.419	8.262
10	26.230	19.089	12.623	6.613
11	33.542	22.071	18.422	15.361
12	36.600	26.101	16.987	14.012
13	22.952	20.272	22.922	12.665
14	22.952	18.801	18.410	8.323
15	25.913	25.655	15.201	8.809
16	27.481	25.568	16.857	12.592
17	27.481	25.568	16.857	12.592
18	38.344	27.081	18.409	14.012
19	29.699	22.588	19.787	14.014
20	40.036	20.148	18.410	11.565
21	27.415	31.299	19.787	14.012
22	45.133	34.453	21.439	15.361
23	34.681	29.977	15.493	12.592
24	34.681	29.977	15.493	12.592
25	43.697	28.283	21.255	15.361
26	40.768	29.769	22.691	15.361
27	30.474	27.623	16.987	11.246
28	45.133	22.588	24.286	15.361
29	45.133	22.588	24.286	15.361
30	45.133	22.588	24.286	15.361

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dengan membagikan kuesioner yang telah disiapkan, kemudian dilakukan analisis jawaban responden

berdasarkan variabel yang terdiri dari variabel *good governance* (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2), sistem pengendalian intern (X_3) dan kualitas laporan keuangan (Y). Analisis jawaban responden berdasarkan variabel adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6
Analisis Jawaban Responden
Variabel *Good Governance* (X_1)

P	Jawaban Responden					Jumlah	% Jawaban					Jumlah
	SS	S	N	TS	STS		SS	S	N	TS	STS	
1	9	6	2	11	2	30	36	20	7	37	6	100%
2	9	19	1	1	-	30	30	64	3	3	-	100%
3	12	18	-	-	-	30	40	60	-	-	-	100%
4	10	19	1	-	-	30	33	64	3	-	-	100%
5	13	15	2	-	-	30	43	50	7	-	-	100%
6	11	13	3	3	-	30	37	43	10	10	-	100%
7	11	17	2	-	-	30	37	57	6	-	-	100%
8	16	11	3	-	-	30	53	37	10	-	-	100%
9	14	16	-	-	-	30	47	53	-	-	-	100%
10	10	18	2	-	-	30	33	60	7	-	-	100%
11	15	13	1	1	-	30	50	43	3	4	-	100%
12	16	10	3	1	-	30	53	53	33	10	4	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.6 data hasil jawaban responden untuk 12 pernyataan pada variabel *good governance* (X_1) dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada variabel *good governance* (X_1) diketahui 19 (64%) responden menjawab setuju dengan alasan penerapan *good governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, hal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan *good governance* yang dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat.

Tabel IV.7
Analisis Jawaban Responden
Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X₂)

P	Jawaban Responden					Jumlah	% Jawaban					Jumlah
	SS	S	N	TS	STS		SS	S	N	TS	STS	
1	9	20	1	-	-	30	30	67	3	-	-	100%
2	6	22	1	1	-	30	20	73	3	4	-	100%
3	7	17	1	3	2	30	23	57	3	10	7	100%
4	7	17	1	3	2	30	23	57	13	7	-	100%
5	10	17	2	-	1	30	33	57	7	3	-	100%
6	6	21	3	-	-	30	20	70	10	-	-	100%
7	14	15	1	-	-	30	47	50	3	-	-	100%
8	10	18	1	1	-	30	33	60	3	4	-	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.7 data hasil jawaban responden untuk 8 pernyataan pada variabel standar akuntansi pemerintah (X₂) dapat disimpulkan pernyataan pada variabel standar akuntansi pemerintah (X₂) diketahui 20 (73%) responden menjawab setuju alasannya standar akuntansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 maka akan mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Tabel IV.8
Analisis Jawaban Responden
Variabel Sistem Pengendalian Intern (X₃)

P	Jawaban Responden					Jumlah	% Jawaban					Jumlah
	SS	S	N	TS	STS		SS	S	N	TS	STS	
1	10	18	2	-	-	30	33	60	7	-	-	100%
2	10	17	3	-	-	30	33	57	10	-	-	100%
3	14	13	2	1	-	30	47	43	7	3	-	100%
4	8	21	1	-	-	30	27	70	3	-	-	100%
5	14	15	1	-	-	30	47	50	3	-	-	100%
6	16	14	-	-	-	30	53	47	-	-	-	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.8 data hasil jawaban responden untuk 6 pernyataan pada variabel sistem pengendalian intern (X₃) diketahui 21 (70%) menjawab setuju alasannya sistem pengendalian intern yang tinggi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan akan menghasilkan sistem pengendalian intern yang baik.

Tabel IV.9
Analisis jawaban Responden
Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

P	Jawaban Responden					Jumlah	% Jawaban					Jumlah
	SS	S	N	TS	STS		SS	S	N	TS	STS	
1	17	10	3	-	-	30	57	33	10	-	-	100%
2	17	10	2	1	-	30	57	33	7	3	-	100%
3	16	13	1	-	-	30	53	43	4	-	-	100%
4	11	15	3	1	-	30	37	50	10	3	-	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.9 data hasil jawaban responden untuk 4 pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan (Y) dapat disimpulkan pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan (Y) diketahui 17 (57%) responden menjawab sangat setuju alasannya karena untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan. Seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode pelaporan guna untuk meningkatkan laporan keuangan pemerintah berdasarkan kerangka konsep PP No 71 tahun 2010.

Hasil analisis jawaban responden berdasarkan variabel kemudian ditabulasi kembali berdasarkan indikator setiap variabel, berikut dijelaskan hasil rekapitulasi jawaban responden berdasarkan indikator.

a. Variabel *Good Governance* (X_1)

Variabel *good governance* (X_1) berjumlah 12 pernyataan yang terdiri dari 9 indikator yaitu *participation*, *rule of law*, *transparency*, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, *effeciency* and *Eefectiviness*, *accountability*, *strategic vision*.

1) Indikator *Participation*

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator *participation* dapat dilihat pada Tabel IV.10 sebagai berikut :

Tabel IV.10
Analisis Jawaban Responden
Indikator *Participation*

Keterangan	Pernyataan 1		Pernyataan 2	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	9	30	9	30
Setuju	6	20	19	63
Netral	2	7	1	3
Tidak Setuju	11	37	1	4
Sangat Tidak Setuju	2	6	-	-
Jumlah	30	100	30	100

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.10 pernyataan pada indikator *participation*, diketahui 18 (30%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena keterlibatan pegawai dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintahan yang dapat menyalurkan aspirasinya dan partisipasi pegawai dalam hal pemerintahan dengan keterlibatan pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Diketahui 25 (42%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena partisipasi pegawai harusnya dilibatkan karena keterlibatan

pegawai itulah pemerintah bisa menerima kritik dan saran, diketahui 3 (5%) responden menyatakan netral dengan alasan karena pemerintah memberikan kesempatan terlibat langsung dalam pemerintahan akan tetapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak mengikutsertakan pegawai harus menuruti peraturan yang dibuat oleh pemerintah, diketahui 12 (30%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena instansi pemerintah tidak mengikutsertakan pegawai dalam membuat kebijakan, diketahui 2 (3%) responden menyatakan sangat tidak setuju dengan alasan instansi pemerintah dalam membuat kebijakan tidak boleh melibatkan pegawai, pegawai harus menerima kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2) Indikator *Rule Of Law*

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator *rule of law* dapat dilihat pada Tabel IV.11 sebagai berikut :

Tabel IV.11
Analisis Jawaban Responden
Indikator *Rule Of Law*

Keterangan	Pernyataan 1		Pernyataan 2	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	12	40	10	33
Setuju	18	60	19	63
Netral	-	-	1	4
Tidak Setuju	-	-	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Jumlah	30	100	30	100

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.11 pernyataan pada indikator *rule of law*, diketahui 22 (37%) menyatakan sangat setuju dengan alasan

karena untuk menegakan hukum dengan baik harus konsisten, tidak diskriminasi dan independensi peradilan, diketahui 37 (62%) menyatakan setuju dengan alasannya karena kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu kepada seluruh pegawai, diketahui 1 (2%) menyatakan netral dengan alasan karena pemerintah harus menegakan hukum dengan baik.

3) Indikator *Transparency*

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator *transparency* dapat dilihat pada Tabel IV.12 sebagai berikut :

Tabel IV.12
Analisis Jawaban Responden
Indikator *Transparency*

Keterangan	Pernyataan 1		Pernyataan 2	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	13	43	11	37
Setuju	15	50	13	43
Netral	2	7	3	10
Tidak Setuju	-	-	3	10
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Jumlah	30	100	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.12 pernyataan pada indikator *transparency*, diketahui 24 (31%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena prinsip transparansi bisa menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, diketahui 28 (47%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, diketahui 5 (8%) responden menyatakan netral dengan alasan karena prinsip

transparansi dalam pemerintahan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, , diketahui 3 (5%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena pemerintah seharusnya tidak mempublikasikan informasi keuangan karena akan berdampak pada pemerintah daerah tersebut.

4) Indikator *Responsiveness*

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator *responsiveness* dapat dilihat pada Tabel IV.13 sebagai berikut :

Tabel IV.13
Analisis Jawaban Responden
Indikator *Responsiveness*

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	11	37
Setuju	17	57
Netral	2	6
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.13 pernyataan pada indikator *responsiveness*, diketahui 11 (37%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena pemerintah harus cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diketahui 17 (57%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan, diketahui 2 (6%) responden menyatakan netral dengan alasan karena pemerintah

harus mengutamakan tanggung jawab pekerjaan barulah cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5) Indikator *Consensus Orientation*

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator *consensus orientation* dapat dilihat pada Tabel IV.14 sebagai berikut :

Tabel IV.14
Analisis Jawaban Responden
Indikator *Consensus Orientation*

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	16	53
Setuju	11	37
Netral	3	10
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.14 pernyataan pada indikator *consensus orientation*, diketahui 16 (53%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi yang terwakili, diketahui 11 (37%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena pemerintah harus memperbaiki kepentingan untuk membuat kebijakan bagi semua pihak yang berkepentingan, diketahui 3 (10%) responden menyatakan netral dengan alasan karena instansi pemerintah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi konsensus.

6) Indikator *Equity*

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator *equity* dapat dilihat pada Tabel IV.15 sebagai berikut :

Tabel IV.15
Analisis Jawaban Responden
Indikator *Equity*

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	14	47
Setuju	16	53
Netral	-	-
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.15 pernyataan pada indikator *equity*, diketahui 16 (53%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat, diketahui 16 (53%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena prinsip kesetaraan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

7) Indikator *Effeciency and Effectiviness*

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator *effeciency and effectiviness* dapat dilihat pada Tabel IV.16 sebagai berikut :

Tabel IV.16
Analisis Jawaban Responden
Indikator *Effeciency and Effectiviness*

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	10	33
Setuju	18	60
Netral	2	7
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.16 pernyataan pada indikator *effeciency and effectiviness*, diketahui 10 (33%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena instansi pemerintah harus bisa menggunakan biaya relatif kecil untuk kualitas yang terbaik, diketahui 18 (60%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil guna, diketahui 2 (7%) responden menyatakan netral dengan alasan karena pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya harus efektif dan efisien.

8) Indikator *Accountability*

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator *accountability* dapat dilihat pada Tabel IV.17 sebagai berikut :

Tabel IV.17
Analisis Jawaban Responden
Indikator *Accountability*

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	15	50
Setuju	13	43
Netral	1	3
Tidak Setuju	1	4
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.17 pernyataan pada indikator *accountability*, diketahui 15 (50%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan masyarakat sangat penting jika semua kegiatan yang terjadi terdokumentasi dengan baik, diketahui 13 (43%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena pemerintah harus mempertanggung jawabkan kegiatannya secara rutin, diketahui 1 (3%) responden menyatakan netral dengan alasan karena semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dalam satu periode, diketahui 1 (3%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena pertanggungjawaban pemerintah dilakukan untuk per periode saja.

9) Indikator *Strategic Vision*

Hasil rekapitulasi jawaban *strategic vision* dapat dilihat pada Tabel IV.18 sebagai berikut :

Tabel IV.18
Analisis Jawaban Responden
Indikator *Strategic Vision*

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	16	53
Setuju	10	33
Netral	3	10
Tidak Setuju	1	3
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.18 pernyataan pada indikator *strategic vision*, diketahui 16 (53%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena para pemimpin dan pegawai memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik, diketahui 10 (33%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena pemerintahan yang baik itu sudah memiliki strategi yang jelas untuk kedepannya, diketahui 3 (10%) responden menyatakan netral dengan alasan karena visi strategi harus diterapkan sesuai dengan yang telah ditentukan, diketahui 1 (3%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena pemerintah harus memperbaharui strategi setiap tahunnya.

b. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X_2)

Variabel standar akuntansi pemerintah (X_2) berjumlah 8 pernyataan yang terdiri dari 8 indikator yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

1) Indikator Basis Akuntansi

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator basis akuntansi dapat dilihat pada Tabel IV.19 sebagai berikut :

Tabel IV.19
Analisis Jawaban Responden
Indikator Basis Akuntansi

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	9	30
Setuju	20	67
Netral	1	3
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.19 pernyataan pada indikator basis akuntansi, diketahui 9 (30%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena menurut PP No 71 Tahun 2010 pemerintah sudah harus menerapkan basis akrual dalam menyajikan laporan keuangan, diketahui 20 (67%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena menurut peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis kas contohnya laporan realisasi anggaran, diketahui 1 (3%) responden menyatakan netral dengan alasan karena sejak tahun 2010 seluruh instansi pemerintah sudah harus menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

2) Indikator Nilai Historis

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator nilai historis dapat dilihat pada Tabel IV.20 sebagai berikut :

Tabel IV.20
Analisis Jawaban Responden
Indikator Nilai Historis

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	6	20
Setuju	22	73
Netral	1	3
Tidak Setuju	1	4
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.20 pernyataan pada indikator nilai historis, diketahui 6 (20%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena jika tidak terdapat nilai historis masih dapat menggunakan nilai wajar aset, diketahui 22 (73%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena pencatatan didasarkan pada nilai historis. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi, diketahui 1 (3%) responden menyatakan netral dengan alasan karena aset dicatat berdasarkan nilai historis, diketahui 1 (4%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena pelaporan keuangan untuk aset harus dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas.

3) Indikator Realisasi

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator realisasi dapat dilihat pada Tabel IV.21 sebagai berikut :

Tabel IV.21
Analisis Jawaban Responden
Indikator Realisasi

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	7	23
Setuju	17	57
Netral	1	3
Tidak Setuju	3	10
Sangat Tidak Setuju	2	7
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.21 pernyataan pada indikator realisasi, diketahui 7 (23%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikan dalam akuntansi komersial, diketahui 17 (57%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran telah menambah dan mengurangi kas, diketahui 1 (3%) responden menyatakan netral dengan alasan karena pendapatan basis kas yang tersedia telah di otorisasikan melalui anggaran pemerintah, diketahui 3 (10%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas harusnya menggunakan basis akrual, diketahui 2 (7%) responden menyatakan sangat tidak setuju dengan alasan karena sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 laporan keuangan yang disajikan berdasarkan basis akrual.

4) Indikator Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator substansi mengungguli bentuk formal dapat dilihat pada Tabel IV.22 sebagai berikut :

Tabel IV.22
Analisis Jawaban Responden
Indikator Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	7	23
Setuju	17	57
Netral	4	13
Tidak Setuju	2	7
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.22 pernyataan pada indikator substansi mengungguli bentuk formal, diketahui 7 (23%) menyatakan sangat setuju dengan alasan karena informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, diketahui 17 (57%) menyatakan setuju dengan alasan karena secara substansi transaksi yang terjadi pemerintah harus mencatatnya dalam neraca, diketahui 4 (13%) menyatakan netral dengan alasan karena transaksi perlu dicatat sesuai substansi bukan hanya aspek formalitasnya, diketahui 2 (7%) menyatakan tidak setuju dengan alasan karena jika substansi transaksi berbeda dengan aspek formalitasnya maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

5) Indikator Periodisitas

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator periodisitas dapat dilihat pada Tabel IV.23 sebagai berikut :

Tabel IV.23
Analisis Jawaban Responden
Indikator Periodisitas

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	10	33
Setuju	17	57
Netral	2	7
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	3
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.23 pernyataan pada indikator periodisitas, diketahui 10 (33%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena laporan keuangan yang dibuat dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga posisi sumberdaya yang dimiliki dapat ditentukan, diketahui 17 (57%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena periode-pelaporan yang dibuat untuk menentukan kinerja pemerintah dapat diukur dan posisi sumberdaya yang dimilikinya, diketahui 2 (7%) responden menyatakan netral dengan alasan karena laporan keuangan yang disajikan dianjurkan menggunakan periode tahunan, diketahui 1 (3%) responden menyatakan sangat tidak setuju dengan alasan karena laporan keuangan tidak lagi berdasarkan periode bulanan dan semesteran.

6) Indikator Konsistensi

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator konsistensi dapat dilihat pada Tabel IV.24 sebagai berikut :

Tabel IV.24
Analisis Jawaban Responden
Indikator Konsistensi

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	6	20
Setuju	21	70
Netral	3	10
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.24 pernyataan pada indikator konsistensi, diketahui 6 (20%) menyatakan sangat setuju dengan alasan karena jika menggunakan prinsip konsisten dalam menyajikan laporan keuangan maka tidak akan membingungkan para pengguna, diketahui 21 (70%) menyatakan setuju dengan alasan karena dengan menggunakan prosedur dan teknik yang sama untuk periode berikutnya maka pemerintah menerapkan prinsip konsistensi internal, diketahui 3 (10%) menyatakan netral dengan alasan karena prinsip konsistensi ini untuk menjamin perbandingan prosedur dan teknik yang digunakan sama untuk periode akuntansi berikutnya.

7) Indikator Pengungkapan Lengkap

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator penyajian lengkap dapat dilihat pada Tabel IV.25 sebagai berikut :

Tabel IV.25
Analisis Jawaban Responden
Indikator Pengungkapan Lengkap

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	14	47
Setuju	15	50
Netral	1	3
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.25 pernyataan pada indikator pengungkapan lengkap, diketahui 14 (47%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena laporan keuangan harus disajikan secara lengkap untuk memberikan informasi yang cukup, diketahui 15 (50%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena jika laporan keuangan menggunakan prinsip pengungkapan dimana memberikan informasi yang cukup bagi pihak-pihak tersebut dapat mengambil keputusan yang informative, diketahui 1 (3%) responden menyatakan netral dengan alasan karena laporan keuangan yang lengkap untuk mengambil keputusan yang tepat.

8) Indikator Penyajian Wajar

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator penyajian wajar dapat dilihat pada Tabel IV.26 sebagai berikut :

Tabel IV.26
Analisis Jawaban Responden
Indikator Penyajian Wajar

Pertanyaan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	10	33
Setuju	18	60
Netral	1	3
Tidak Setuju	1	4
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.26 pernyataan pada indikator penyajian wajar, diketahui 10 (33%) menyatakan sangat setuju dengan alasan karena laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan PP No 71 tahun 2010, diketahui 18 (60%) menyatakan setuju dengan alasan karena pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, diketahui 1 (3%) menyatakan netral dengan alasan karena laporan keuangan yang disajikan secara wajar untuk para pengguna laporan keuangan, diketahui 1 (4%) menyatakan tidak setuju dengan alasan karena masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyajikan laporan keuangan secara tidak wajar.

c. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X_3)

Variabel sistem pengendalian intern (X_3) berjumlah 6 pernyataan yang terdiri dari 5 indikator yaitu lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

1) Indikator Lingkungan Pengendalian

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator lingkungan pengendalian dapat dilihat pada Tabel IV.27 sebagai berikut :

Tabel IV.27
Analisis Jawaban Responden
Indikator Lingkungan Pengendalian

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	10	33
Setuju	18	60
Netral	2	7
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.27 pernyataan pada indikator lingkungan pengendalian, diketahui 10 (33%) menyatakan sangat setuju dengan alasan karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur etika perilaku yang dapat membuat pengendalian internal berjalan dengan baik, diketahui 18 (60%) menyatakan setuju dengan alasan karena dengan adanya peraturan baik secara lisan maupun tertulis merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur dalam sistem pengendalian, diketahui 2 (7%) menyatakan netral dengan alasan karena pemerintah harus bisa memastikan setiap pegawai memiliki sifat integritas, jujur dan kompeten.

2) Indikator Penilaian Risiko

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator penilaian risiko dapat dilihat pada Tabel IV.28 sebagai berikut :

Tabel IV.28
Analisis Jawaban Responden
Indikator Penilaian Risiko

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	9	30
Setuju	6	20
Netral	2	7
Tidak Setuju	11	37
Sangat Tidak Setuju	2	6
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.28 pernyataan pada indikator penilaian risiko, diketahui 9 (30%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena dengan mengidentifikasi risiko dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, diketahui 17 (57%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena pengendalian intern harus mengidentifikasi penilaian risiko secara efisien dan efektif yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, diketahui 2 (7%) responden menyatakan netral dengan alasan karena pemerintah harus bisa menganalisa risiko yang dihadapi, diketahui 11 (37%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena pemerintah belum bisa menganalisis risiko yang dihadapi baik dari luar maupun dalam, diketahui 2 (6 %) responden menyatakan sangat tidak setuju dengan alasan karena risiko yang

dihadapi masih terjadi meskipun dari awal telah dilakukan identifikasi risiko.

3) Indikator Kegiatan Pengendalian

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Tabel IV.29 sebagai berikut :

Tabel IV.29
Analisis Jawaban Responden
Indikator Kegiatan Pengendalian

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	14	47
Setuju	13	43
Netral	2	7
Tidak Setuju	1	3
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.29 pernyataan pada indikator kegiatan pengendalian, diketahui 14 (47%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena jika pimpinan mengarahkan pegawai dengan baik maka akan mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko, diketahui 13 (43%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat membantu pegawai dalam melaksanakan arahan pimpinan, diketahui 2 (7%) responden menyatakan netral dengan alasan karena kegiatan pengendalian dapat meminimalisis risiko yang akan dihadapi, diketahui 1 (3%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena walaupun

pemerintah telah melakukan kegiatan pengendalian dengan baik masih terdapatnya risiko yang dihadapi.

4) Indikator Informasi dan Komunikasi

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator informasi dan komunikasi dapat dilihat pada Tabel IV.30 sebagai berikut :

Tabel IV.30
Analisis Jawaban Responden
Indikator Informasi dan Komunikasi

Keterangan	Pernyataan 1		Pernyataan 2	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	8	27	14	47
Setuju	21	70	15	50
Netral	1	3	1	3
Tidak Setuju	-	-	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Jumlah	30	100	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.30 pernyataan pada indikator informasi dan komunikasi, diketahui 22 (37%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena jika pemerintah menyediakan, memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi artinya sistem pengendalian intern berjalan dengan baik, diketahui 36 (60%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan membutuhkan sistem informasi yang diperbaharui secara terus menerus agar laporan keuangan yang disajikan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, diketahui 2 (3%) responden menyatakan netral dengan alasan karena pemerintah harus mengembangkan dan mengelola informasi dan komunikasi.

5) Indikator Pemantauan

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator responden indikator pemantauan dapat dilihat pada Tabel IV.31 sebagai berikut :

Tabel IV.31
Analisis Jawaban Responden
Indikator Pemantauan

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	16	53
Setuju	14	47
Netral	-	-
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.31 pernyataan pada indikator pemantauan, diketahui 16 (53%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik, diketahui 14 (47%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena pemerintah harus menerapkan dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan atau pemantauan secara rutin.

d. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Variabel kualitas laporan keuangan (Y) berjumlah 4 pernyataan yang terdiri dari 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

1) Indikator Relevan

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator relevan dapat dilihat pada Tabel IV.32 sebagai berikut :

Tabel IV.32
Analisis Jawaban Responden Indikator Relevan

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	17	57
Setuju	10	33
Netral	3	10
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.32 pernyataan pada indikator relevan, diketahui 17 (57%) menyatakan sangat setuju dengan alasan karena dengan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dapat dikatakan relevan, diketahui 10 (33%) menyatakan setuju dengan alasan karena laporan keuangan yang disajikan secara lengkap dapat mempengaruhi keputusan pengguna, diketahui 3 (10%) menyatakan netral dengan alasan karena laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah mencakup semua informasi akuntansi.

2) Indikator Andal

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator andal dapat dilihat pada Tabel IV. 33 sebagai berikut :

Tabel IV.33
Analisis Jawaban Responden Indikator Andal

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	17	57
Setuju	10	33
Netral	2	7
Tidak Setuju	1	3
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.33 pernyataan pada indikator andal, diketahui 17 (57%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, diketahui 10 (33%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena laporan keuangan menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, diketahui 2 (7%) responden menyatakan netral dengan alasan karena penyajian laporan keuangan tidak berpihak pada pihak-pihak tertentu, diketahui 1 (3%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena masih terdapatnya pihak-pihak yang tidak jujur dalam menyajikan laporan keuangan.

3) Indikator Dapat dibandingkan

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator dapat dibandingkan dapat dilihat pada Tabel IV.34 sebagai berikut :

Tabel IV.34
Analisis Jawaban Responden
Indikator Dapat dibandingkan

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	16	53
Setuju	13	43
Netral	1	4
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.34 pernyataan pada indikator dapat dibandingkan, diketahui 16 (53%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan karena dengan melakukan perbandingan tersebut pemerintah bisa menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik untuk periode selanjutnya, diketahui 13 (43%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena dengan laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk melihat sejauh mana memperbaiki kesalahan yang dilakukan periode sebelumnya, diketahui 1 (4%) responden menyatakan netral dengan alasan karena laporan keuangan periode saat ini harus bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4) Indikator Dapat Dipahami

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator dapat dipahami dapat dilihat pada Tabel IV.35 sebagai berikut :

Tabel IV.35
Analisis Jawaban Responden
Indikator Dapat dipahami

Keterangan	Pernyataan 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	11	37
Setuju	15	50
Netral	3	10
Tidak Setuju	1	3
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.35 pernyataan pada indikator dapat dipahami, diketahui 11 (37%) menyatakan sangat setuju dengan alasan karena informasi disajikan dalam laporan keuangan dipahami oleh pengguna dan adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud, diketahui 15 (50%) menyatakan setuju dengan alasan karena laporan keuangan disajikan dapat disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna agar bisa dipahami, diketahui 3 (10%) menyatakan netral dengan alasan karena laporan keuangan dibuat harus dapat dipahami, diketahui 1 (3%) menyatakan tidak setuju dengan alasan karena laporan keuangan disajikan disesuaikan hanya untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Hasil Pengolahan Data Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap item-item pertanyaan dari masing-masing variabel yang ada dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana item-item yang membentuk konsep yang telah disusun dapat mewakili variabel apabila r_{hitung} dari pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} . Korelasi harus memiliki nilai atau arah yang positif. Arah positif tersebut berarti bahwa r_{hitung} (nilai korelasi yang akan digunakan untuk mengukur validitas) harus lebih besar dari r_{tabel} .

Nilai r_{tabel} untuk populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 responden dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi sebesar 5% dan $n = 30$ adalah 0,361. Jadi, apabila r_{hitung} lebih kecil dari 0,361 maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan SPSS *for Windows* versi 21 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Variabel *Good Governance* (X_1)

Hasil dari pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel *good governance* (X_1) adalah sebagai berikut :

Tabel VI.36
Hasil Pengujian Validitas Variabel *Good Governance* (X_1)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,621	0,361	Valid
2	0,777	0,361	Valid
3	0,542	0,361	Valid
4	0,750	0,361	Valid
5	0,750	0,361	Valid
6	0,683	0,361	Valid
7	0,728	0,361	Valid
8	0,841	0,361	Valid
9	0,760	0,361	Valid
10	0,780	0,361	Valid
11	0,659	0,361	Valid
12	0,398	0,361	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap butir pernyataan dari variabel *good governance* (X_1) dapat disimpulkan bahwa 12 (duabelas) butir pernyataan tersebut dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau r_{hitung} lebih besar dari 0,361.

b. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X_2)

Hasil pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel standar akuntansi pemerintah (X_2) adalah sebagai berikut :

Tabel VI.37
Hasil Pengujian Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X_2)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,787	0,361	Valid
2	0,634	0,361	Valid
3	0,681	0,361	Valid
4	0,632	0,361	Valid
5	0,627	0,361	Valid
6	0,429	0,361	Valid
7	0,533	0,361	Valid
8	0,424	0,361	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap butir pernyataan dari variabel standar akuntansi pemerintah (X_2) dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) butir pernyataan tersebut dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau r_{hitung} lebih besar dari 0,361.

c. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X_3)

Hasil pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel sistem pengendalian intern (X_3) adalah sebagai berikut :

Tabel VI.38
Hasil Pengujian Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern
(X₃)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,770	0,361	Valid
2	0,598	0,361	Valid
3	0,719	0,361	Valid
4	0,703	0,361	Valid
5	0,467	0,361	Valid
6	0,775	0,361	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap butir pernyataan dari variabel sistem pengendalian intern (X₃) dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) butir pernyataan tersebut dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau r_{hitung} lebih besar dari 0,361.

d. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebagai berikut :

Tabel VI.39
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan
(Y)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,813	0,361	Valid
2	0,881	0,361	Valid
3	0,752	0,361	Valid
4	0,651	0,361	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap butir pernyataan dari variabel kualitas laporan keuangan (Y) dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) butir pernyataan tersebut dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau r_{hitung} lebih besar dari 0,361.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menggunakan pengujian dengan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan *Software SPSS 21*. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternative jawaban lebih dari dua. Suatu Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's Alpha* $> 0,70$.

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel *good governance* (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2), sistem pengendalian intern (X_3) dan kualitas laporan keuangan (Y) dapat dilihat pada Tabel IV.40 sebagai berikut :

Tabel VI.40
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X_1	0,959	0,70	Reliabel
X_2	0,913	0,70	Reliabel
X_3	0,806	0,70	Reliabel
Y	0,820	0,70	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017

Hasil dari pengujian reliabilitas untuk variabel *good governance* (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2), sistem pengendalian intern (X_3) dan kualitas laporan keuangan (Y) dapat dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang terbebas dari autokorelasi, multikolonieritas dan heteroskedasitas. Cara yang

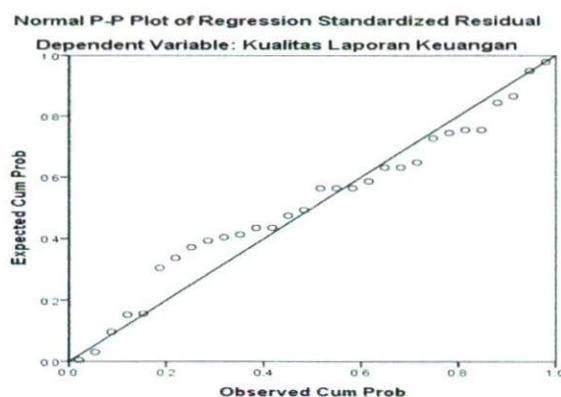
digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, dalam pengujian ini terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (*normal P-P plot*) dan analisis statistik (*One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*).

Uji normalitas dengan *P-P plot* dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut :

Gambar IV.2
Hasil output SPSS
Uji Normalitas (*normal P-P plot*)



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan Gambar IV.2 dapat disimpulkan bahwa grafik *normal P-P plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test* dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.41
Hasil output SPSS
Uji Normalitas (*One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.65774537
	Absolute	.132
Most Extreme Differences	Positive	.101
	Negative	-.132
Kolmogorov-Smirnov Z		.722
Asymp. Sig. (2-tailed)		.674

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan Tabel IV.41 dapat disimpulkan bahwa Uji Normalitas menggunakan teknik analisis *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,674 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonearitas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variable*).

Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.42
Hasil Pengujian Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	-1.865	2.365			
Good Governance	.059	.057	.161	.624	1.604
SAP	.174	.084	.270	.866	1.155
SPI	.425	.113	.558	.680	1.471

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

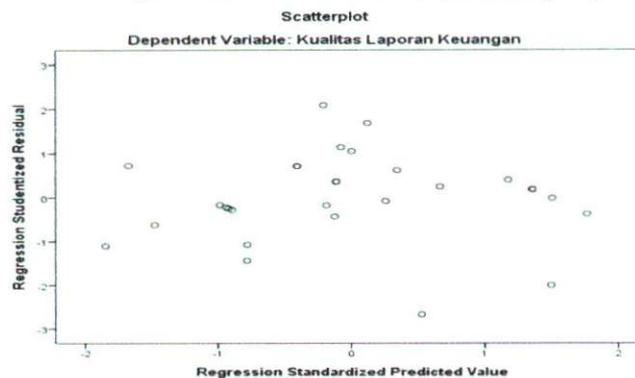
Berdasarkan Tabel IV.42 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* tiap variabel lebih besar 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji *scatter plot*.

Uji heteroskedastisitas dengan *Scatterplot* dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut :

Gambar IV.3
Hasil *Output* SPSS
Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan Gambar IV.3, antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji *durbin watson* (DW).

Uji *durbin watson* dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.43
Hasil Output SPSS
Uji Auto Korelasi (Durbin Watson)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.784 ^a	.614	.569	1.751	1.739

a. Predictors: (Constant), SPI, SAP, Good Governance

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan Tabel IV.43 diketahui nilai DW yaitu 1,739 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel *durbin watson* dimana jumlah sampel $N = 30$ dan jumlah variabel independen $K = 3$ maka diperoleh $d_u = 1,6498$ dan $d_{4-d_u} = 2,7862$ maka ditarik kesimpulan $d_u < d < d_{4-d_u}$ berarti tidak ada auto korelasi positif atau negatif.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel yang lebih dari satu dengan variabel terikat, sebelum dilakukan uji hipotesis signifikan antara hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah sebuah model regresi memiliki hubungan yang linear. Uji regresi linier berganda ini dibantu dengan SPSS 21 maka hasil yang didapat dapat dilihat pada Tabel IV.44 sebagai berikut :

Tabel IV.44
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	-1.865	2.365			-.788	.438
Good Governance	.059	.057	.161		1.042	.307
SAP	.174	.084	.270		2.061	.049
SPI	.425	.113	.558		3.780	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Dari hasil regresi berganda yang peneliti lakukan pada variabel *good governance* (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2) dan sistem pengendalian intern (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y' = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y' = -1,865 + 0,059X_1 + 0,174X_2 + 0,425X_3$$

Dari persamaan regresi tersebut menggambarkan :

a. Pengaruh *Good Governance* (X_1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Nilai koefisien regresi *good governance* (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,059% (5,9%), berarti bahwa *good governance* (X_1) memiliki hubungan dengan kualitas laporan keuangan (Y) yaitu sebesar 5,9%, artinya jika ada kenaikan *good governance* (X_1) sebesar 100% maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 5,9%, begitu juga sebaliknya jika ada

penurunan *good governance* (X_1) 100% maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 5,9%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel *good governance* (X_1) dengan kualitas laporan keuangan (Y).

b. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Nilai koefisien regresi standar akuntansi pemerintah (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,174% (17,4%), berarti bahwa standar akuntansi pemerintah (X_2) memiliki hubungan dengan kualitas laporan keuangan (Y) yaitu sebesar 17,4%, artinya jika ada kenaikan standar akuntansi pemerintah (X_2) sebesar 100% maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 17,4 %, begitu juga sebaliknya jika ada penurunan standar akuntansi pemerintah (X_2) sebesar 100% maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 17,4%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel standar akuntansi pemerintah (X_2) dengan kualitas laporan keuangan (Y).

c. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X_3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Nilai koefisien regresi sistem pengendalian intern (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,425%

(42,5%), berarti bahwa sistem pengendalian intern (X_3) memiliki hubungan langsung dengan kualitas laporan keuangan (Y) yaitu sebesar 42,5% artinya jika ada kenaikan sistem pengendalian intern (X_3) sebesar 100% maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 42,5%, begitu juga sebaliknya jika ada penurunan sistem pengendalian intern (X_3) sebesar 100% maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 42,5%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel sistem pengendalian intern (X_3) dengan kualitas laporan keuangan (Y).

5. Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square*. *R Square* dapat dilihat pada Tabel IV.45 sebagai berikut :

Tabel IV.45
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.784 ^a	.614	.569	1.75077

a. Predictors: (Constant), SPI, SAP, Good Governance

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan Tabel IV.45 diperoleh nilai *R Square* 0,569 atau 56,9%. Hasil ini berarti 56,9% variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel *good governance* (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2) dan sistem pengendalian intern (X_3), sedangkan sisanya 38,6% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kapasitas sumber daya dan teknologi informasi.

6. Uji Hipotesis F

Berdasarkan rumusan masalah bagaimanakah pengaruh *good governance* (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2) dan sistem pengendalian intern (X_3) secara bersama terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji F, dapat dilihat dari Tabel IV.46 sebagai berikut :

Tabel IV.46
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	126.756	3	42.252	13.784	.000 ^b
Residual	79.695	26	3.065		
Total	206.452	29			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), SPI, SAP, Good Governance

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai F_{hitung} adalah sebesar 13,784, sedangkan nilai F_{tabel} untuk taraf nyata (α) sebesar 5% serta $db = n - k - 1$ yaitu $n = 30$, $K = 3$ dan $db = 26$ adalah

sebesar 2,98 dengan kata lain $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13,784 > 2,98$) sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern secara bersama memengaruhi kualitas laporan keuangan, dari hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig) yang muncul adalah 0,000 yang berarti $\text{sig } F (0,000) < \alpha (0,05)$, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat signifikansi yang kuat terjadi pada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka kesimpulannya *good governance* (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2) dan sistem pengendalian intern (X_3) secara bersama signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan (Y).

7. Uji Hipotesis t

Berdasarkan rumusan masalah maka untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah pengaruh *good governance* (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2) dan sistem pengendalian intern (X_3) secara individual terhadap kualitas laporan keuangan (Y), maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji t, dapat dilihat dari Tabel IV.47 sebagai berikut :

Tabel IV.47
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.865	2.365		-.788	.438
Good Governance	.059	.057	.161	1.042	.307
SAP	.174	.084	.270	2.061	.049
SPI	.425	.113	.558	3.780	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

a. Pengaruh *Good Governance* (X_1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel *good governance* (X_1) sebesar 1,042 sedangkan nilai t_{tabel} dengan α 0,05 (5%) serta $db = n-k-1$ ($30-3-1$) = 26 adalah sebesar 1,706. Jadi dapat disimpulkan nilai t_{hitung} 1,042 < t_{tabel} 1,706. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel *good governance* (X_1) menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak signifikan memengaruhi variabel kualitas laporan keuangan (Y). Hal ini digambarkan dengan nilai signifikansi X_1 0,307 lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa *good governance* tidak signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan.

b. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel standar akuntansi pemerintah (X_2) sebesar 2,061,

sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta db = $n-k-1$ ($30-3-1$) = 26 adalah sebesar 1,706, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} 2,061 > t_{tabel} 1,706. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel standar akuntansi pemerintah (X_2) menunjukkan variabel tersebut signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan (Y), hal ini digambarkan dengan nilai signifikansi X_1 0,049 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah signifikan memengaruhi kualitas laporan Keuangan.

c. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X_3) Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel sistem pengendalian intern (X_3) sebesar 3,780, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta db = $n-k-1$ ($30-3-1$) = 26 adalah sebesar 1,706. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} 3,780 > t_{tabel} 1,706. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel sistem pengendalian intern (X_3) menunjukkan bahwa variabel tersebut signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan (Y), hal ini dapat digambarkan dengan nilai signifikansi X_3 0,001 lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis dari pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan yaitu :

1. Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Setelah membagikan kuesioner pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, penulis dapat membahas mengenai variabel yang diteliti yaitu *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern. Pelaksanaan *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan dengan baik, berdasarkan pernyataan responden pemerintah telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam sistem keuangan dan penyajian laporan keuangan serta didukung dengan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang berjalan dengan optimal.

Pengujian statistik memberikan bukti bahwa *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Dilihat dari pengaruh ketiga variabel, sebaiknya pemerintah melaksanakan ketiga variabel tersebut secara bersama guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan dapat meningkatkan kualitas opini yang diberikan BPK dari sebelumnya mendapat opini wajar dengan

pengecualian (WDP) dan meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azlim (2012) yang mengatakan bahwa penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintah memengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan dan sejalan dengan penelitian Susilawati dan Dwi (2014) yang mengatakan bahwa standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern signifikan memengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Setelah membagikan kuesioner pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, penulis dapat membahas mengenai variabel yang diteliti yaitu *good governance*, pelaksanaan *good governance* pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan dengan baik akan tetapi berdasarkan pernyataan responden pada indikator *participation* responden menyatakan bahwa Instansi Pemerintah tidak mengikutsertakan pegawai dalam membuat kebijakan dan peraturan. Kebijakan dan peraturan yang berlaku untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Manuppan (2009) yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (X₂) Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Setelah membagikan kuesioner pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, penulis dapat membahas mengenai variabel yang diteliti yaitu standar akuntansi pemerintah, hal ini membuktikan standar akuntansi pemerintah telah diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Ogan Ilir. Penerapan standar akuntansi pemerintah diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Jika pemerintahan menerapkan kedelapan prinsip standar akuntansi pemerintah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan baik berdasarkan PP No.71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Dwi (2014) yang mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana (2012) yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Setelah membagikan kuesioner pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, penulis dapat membahas mengenai variabel yang diteliti yaitu sistem

pengendalian intern, hal ini membuktikan sistem pengendalian intern di BPKAD Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan dengan baik. Tujuan sistem pengendalian internal salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuti (2014) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari pembahasan dan uraian bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan bahwa :

1. *Good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan.
2. *Good governance* tidak signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan.
3. Standar akuntansi pemerintah signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan.
4. Sistem pengendalian intern signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis kepada pegawai dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebaiknya BPKAD lebih memperhatikan penerapan *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian

intern dengan meningkatkan pemahaman mengenai hal tersebut dengan mengadakan sosialisasi, pengawasan dan pelatihan secara rutin kepada pegawai di bagian keuangan.

2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan referensi yang lebih banyak lagi dan lebih memperluas objek penelitian. Selain itu untuk menambah variabel lain diluar variabel yang telah diteliti dan juga untuk menambahkan responden baru agar hasil penelitian bisa lebih mewakili dan hasil dari analisis atau penelitian yang dilakukan dapat digeneralisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fikri Biana Adha Inapty dan Sri Pancawati Martiningsih. (2016). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Jurnal ilmu Akuntansi. Vol 9(I).<http://journal.uinjkt.ac.id>. Diakses 20 Oktober 2016.
- Azlim, Darwanis dan Usman Abu Bakar. (2012). *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan*. Jurnal Akuntansi. Vol I No 1. <http://prodipps.unsyiah.ac.id>. Diakses 20 Oktober 2016.
- Baldric Siregar. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Budi Santoso. (2015). *Keagenan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Deddi Nordiawan. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Duwi Priyatno. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta. Gava Media.
- Duwi Priyatno. (2016). *SPSS Handbook*. Yogyakarta : MediaKom
- Erlina, Omar dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta : Salemba Empat.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Erlangga.
- I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi. ISSN 23028556.<http://ojs.unud.ac.id>. Diakses 20 Oktober 2016.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sekor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Manuppan Bangun Tua S. (2015). *Pengaruh Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (studi empiris pada SKPD Kota Dumai)*.

- Jurnal Fekon. Vol 2 No 2. <http://download.portalgaruda.org>. Diakses 20 Oktober 2016.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mudrajad Kuncoro. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : BPF
- Nunuy Nur Afiah. (2009). *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. (2012). Bandung : Fokusmedia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. (2008). Fokusmedia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Susilawati dan Dwi Seftiani Riana. (2014). *Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Study & Accounting research. Vol I No 1. <http://stiestembi.ac.id>. Diakses 20 Oktober 2016
- Tuti Herawati. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. Study & Accounting research. Vol XI, No.1. <http://stiestembi.ac.id>. Diakses 20 Oktober 2016.
- Yusniyar, Darwanis dan Syukriy Abdullah. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap Good Governance dan Dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (studi pada SKPA Pemerintah Aceh)*. Jurnal Magister Akuntansi. Vol 5 No. 2. <http://jurnal.unsyiah.ac.id>. Diakses 20 Oktober 2016



Bapak/Ibu yang saya hormati, bersama ini saya :

Nama : Hilda Sri Hastuti
NIM : 22 2013 294
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Sedang melaksanakan penelitian yang berjudul :

“Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)”.

Hasil kuesioner ini tidak dipublikasikan melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan, kesediaan waktu dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

KUESIONER

DATA RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan
4. Pendidikan :
 SMA
 Diploma 3
 Strata 1
 Strata 2
 Lainnya

Petunjuk Pengisian:

- Pengisian jawaban cukup dengan memberi tanda (X atau \surd) pada pernyataan yang dianggap sesuai dengan pendapat responden (satu jawaban dalam setiap nomor pernyataan).
- Pilihan jawaban : -Sangat Setuju (SS)
-Setuju (S)
-Netral (N)
-Tidak Setuju (TS)
-Sangat Tidak Setuju (STS)

Kuesioner *Good Governance* (X₁)

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	<i>Participation</i>	1. BPKAD mengikutsertakan pegawai dalam membuat kebijakan.					
		2. BPKAD memberikan kesempatan kepada pegawai untuk ikut serta dalam pemerintahan.					
2.	<i>Rule Of Law</i>	3. BPKAD memberlakukan hukum yang telah dibuat kepada seluruh pegawai					
		4. BPKAD menegakkan hukum dengan baik.					
3.	<i>Transparency</i>	5. BPKAD mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan praktek terbaik untuk memastikan kualitas laporan keuangan.					
		6. BPKAD mempublikasikan informasi keuangan dan informasi lain yang material yang berdampak signifikan pada kinerja Pemda.					
4.	<i>Responsiveness</i>	7. BPKAD cepat dan tanggap serta memberikan pelayanan yang baik kepada pihak yang berkepentingan.					
5.	<i>Consensus orientation</i>	8. BPKAD membuat kebijakan dengan memperbaiki kepentingan semua pihak yang berkepentingan.					
6.	<i>Equity</i>	9. BPKAD memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka.					
7.	<i>Effeciency and Effectiveness</i>	10. BPKAD dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki secara efisien dan membuahkan hasil.					
8.	<i>Accountability</i>	11. Semua kegiatan di BPKAD telah di pertanggungjawabkan secara rutin dan tertulis					
9.	<i>Strategic Vision</i>	12. BPKAD sudah memiliki visi misi strategi secara jelas					

Kuesioner Standar Akuntansi Pemerintah (X₂)

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Basis Akuntansi	1. BPKAD menggunakan basis akrual dan basis kas dalam laporan keuangan pemerintah?					
2.	Nilai Historis	2. BPKAD dalam pelaporan keuangan untuk asset tetap dilaporkan sebesar nilai historis.					
3.	Realisasi	3. Pendapatan basis kas yang tersedia telah di otorisasikan melalui anggaran pemerintah digunakan untuk membayar anggaran belanja.					
4.	Substansi menungguli bentuk formal	4. Transaksi atau peristiwa lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya.					
5.	Periodisitas	5. BPKAD dalam pelaporan keuangan menggunakan periode tahunan, bulanan, triwulan dan semesteran.					
6.	Konsistensi	6. BPKAD dalam penerapan metode akuntansi menggunakan prosedur dan teknik yang sama untuk periode akuntansi berikutnya.					
7.	Pengungkapan Lengkap	7. BPKAD membuat laporan keuangan harus memberikan informasi yang cukup bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna mengambil keputusan yang tepat.					
8.	Penyajian Wajar	8. BPKAD menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.					

Kuesioner Sistem Pengendalian Intern (X₃)

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Lingkungan Pengendalian	1. BPKAD mempunyai peraturan baik secara lisan dan tertulis yang mengatur masalah etika perilaku dalam melakukan suatu pengendalian.					
2.	Penilaian Risiko	2. BPKAD dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang di hadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.					
3.	Kegiatan Pengendalian	3. BPKAD harus bisa memastikan pegawai melaksanakan arahan dari pimpinan.					
4.	Informasi dan Komunikasi	4. BPKAD menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.					
		5. BPKAD dalam mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.					
5.	Pemantauan	6. BPKAD dalam melakukan pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.					

Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Relavan	1. Laporan keuangan yang dibuat oleh BPKAD disajikan secara lengkap, tepat waktu dan mencakup semua informasi akuntansi.					
2.	Andal	2. Penyajian laporan keuangan disajikan secara jujur dan diarahkan pada kebutuhan umum serta tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.					
3.	Dapat dibandingkan	3. Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
4.	Dapat dipahami	4. Laporan keuangan yang di sajikan dapat dipahami dan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HILDA SRI HASTUTI	PEMBIMBING
NIM : 22 2013 294	KETUA : Drs. Sunardi, SE., M.Si
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH <i>GOOD GOVERNANCE</i> , STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA BPKAD KABUPATEN OGAN ILIR)	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	11-01-2017	Bab I II III	<i>al</i>		<i>Pabulur</i>
2	17-01-2017	Bab I, II, III	<i>al</i>		<i>ke</i>
3	19-01-2017	Bab IV	<i>al</i>		<i>Pabulur</i>
4	25-01-2017	Bab IV	<i>al</i>		<i>ke</i>
5	27-01-2017	Bab IV, V	<i>al</i>		<i>ke</i>
6	01-01-2017	Bab V	<i>al</i>		<i>ke</i>
7	02-01-2017	Abstrak dan	<i>al</i>		<i>ke</i>
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /
a.n. Dekan
Program Studi
<i>Beti Sunardi</i>
Beti Sunardi, SE., M.Si., Ak., CA



AKREDITASI

INSTITUSI BERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor: 327/SK/BAN-PT/Akred IPT/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred IS/2014 (B)
Nomor: 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/2012 (B)
Nomor: 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpt-IP/2015 (B)

Website: fe.um Palembang.ac.id

Email: fe.umplg@umpalembang.ac.id

Alamat: Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30223 Telp. (0711) 511433 Faksimile (0711) 613018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Rabu, 01 Maret 2017
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Hilda Sri Hastuti
Nim : 222013294
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)

TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Pembimbing	7 Maret 2017	
2	DR. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si, CA	Ketua Penguji	17 Maret 2017	
3	Sodikin, S.E, M.Si	Penguji I	17 Maret 2017	
4	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Penguji II	7 Maret 2017	

Palembang, Maret 2017

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Komp. Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Kode Pos 30662
 INDRALAYA

Indralaya, 31 Januari 2017

Nomor : 900/ 41 /BPKAD/2017
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan selesai riset

Kepada
 Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah
 Palembang
 di -
 Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Hasnandar Setiawan, S.E, M.M
 NIP : 196209111989031006
 Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

menerangkan bahwa :

Nama : Hilda Sri Hastuti
 NIM : 222013294
 Program Studi : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang

Sudah selesai melaksanakan penelitian di bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Demikian keterangan dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
 Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir,

 H. Hasnandar Setiawan, S.E, M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19620911 198903 1 006

BIODATA

Hilda Sri Hastuti
+6281373632920
hildasrihastuti@gmail.com

Biodata

Nama : Hilda Sri Hastuti
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tembok Baru Lrg.Sepakat rt.13 rw.03 No.461
Status : Belum Menikah
Tinggi Badan, Berat badan : 155 cm, 60 kg
Kewarganegaraan : INDONESIA
Email : hildasrihastuti@gmail.com

Orang Tua

Nama Ayah : M.Teguh
Nama Ibu : Eni Wati

Riwayat Pendidikan

1. 2001-2007 SD Negeri 85 Palembang
2. 2007-2010 SMP Negeri 35 Palembang
3. 2010-2013 SMA Negeri 8 Palembang
4. 2013-2017 Universitas Muhammadiyah Palembang